

RELEVANSI KARYA PENELITIAN MIGRASI DALAM PEMBANGUNAN¹

Suko Bandiyono*

Abstract

Migration issue has been neglected during the last decade, although it has a significant relation with development issue. Migration, as a part of demographic component, has changed demographic structure and the society life. This article reviews the existing migration-related publications, describes migration experiences of the society and highlights their relations with development. This article suggests that migration should be taken into account as an independent variable when examining population phenomena.

Keyword: *Migration studies, National development*

Isu tentang migrasi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir kurang memperoleh perhatian dalam penelitian kendati mempunyai makna yang strategis karena berkaitan erat dengan isu pembangunan. Migrasi, sebagai bagian dari komponen demografi, telah menimbulkan perubahan struktur demografi dan kehidupan masyarakat. Artikel ini me-review studi-studi migrasi yang pernah dilakukan, mendeskripsikan pengalaman migrasi masyarakat dan menganalisis hubungannya dengan pembangunan. Artikel ini diakhiri dengan saran akan pentingnya menempatkan migrasi sebagai variabel bebas untuk menjelaskan fenomena kependudukan.

Kata kunci: Studi migrasi, Pembangunan nasional

PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan kependudukan di Indonesia khususnya isu migrasi, dalam dasawarsa terakhir kurang memperoleh perhatian kalau tidak mau disebut telah mengalami kemunduran. Padahal, pengetahuan tersebut mempunyai nilai yang strategis karena mempunyai kaitan erat dengan isu pembangunan.

¹ Artikel ini merupakan bagian dari makalah yang disampaikan pada orasi ilmiah untuk pengukuhan profesor riset bidang kependudukan, Widyagraha LIPI, 23 Maret 2006.

* Suko Bandiyono adalah Peneliti Senior, sebelumnya bekerja di PPK-LIPI. *E-mail:* sukobandiyono@yahoo.com

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mengenal tempat atau waktu, terjadi fenomena sosial yaitu adanya kelompok penduduk yang jumlahnya terus mengalami penambahan. Namun di lain pihak, ada kelompok penduduk yang jumlahnya justru berkurang, bahkan terdapat kelompok penduduk suku bangsa tertentu yang telah mengalami kepunahan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dinamika demografis yang berjalan, yaitu terjadinya proses kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Hal ini merupakan siklus alamiah kehidupan manusia.

Dinamika demografis tersebut terjadi untuk semua penduduk dan mengalami proses selektivitas dalam strukturnya, misalnya menurut jenis kelamin, umur, dan fertilitas. Demikian pula dilihat dari jumlah dan komposisinya telah menyebar dengan intensitas yang berbeda pula. Hal ini dapat terjadi antara lain karena terkait dengan variabel nondemografi. Pengetahuan yang menjelaskan fenomena sosial ini berada dalam koridor demografi sosial atau lazim disebut kependudukan.

Para pakar dan pemerhati masalah kependudukan menyadari bahwa ada hubungan timbal balik antara pembangunan dengan kependudukan. Di satu pihak pembangunan mempengaruhi variabel kependudukan, namun sebaliknya variabel kependudukan mempengaruhi pembangunan. Migrasi sebagai komponen kunci dalam dinamika demografi telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam jumlah, komposisi, dan nilai-nilai yang dibawanya. Untuk dapat mengetahui bagaimana isu sosial dalam konteks migrasi penduduk, uraian berikut adalah deskripsi tentang relevansi penelitian migrasi dalam pembangunan.

PENELITIAN MIGRASI

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah yang luas dan terletak di daerah tropika, di samping mempunyai keuntungan berupa kekayaan sumber daya alam yang potensial, juga memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan mempunyai jumlah etnis yang besar, lebih dari 360. Indonesia juga merupakan salah satu anggota warga dunia yang tidak dapat menghindari dari proses globalisasi. Globalisasi berarti bukan hanya aspek modal, produk, teknologi dan informasi yang akan berinteraksi di Indonesia, tetapi juga aspek manusia. Dalam hal ini Indonesia menghadapi peluang dan tantangan pembangunan baik pada tataran internal maupun internasional.

Di Indonesia, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia ternyata tidak merata untuk semua daerah sehingga telah menimbulkan perbedaan kemampuan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pulau Jawa yang hanya mempunyai luas 6,9% dari luas daratan Indonesia namun mempunyai penduduk hampir duapertiganya. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dalam empat dasawarsa terakhir. Persentase penduduk di Pulau Jawa hanya mengalami penurunan dari 64,9% pada tahun 1961 menjadi 59,3% pada tahun

2000. Persentase penduduk yang tinggal di luar Jawa dengan sendirinya mengalami penambahan dari 35,1% menjadi 40,7% pada kurun waktu yang sama.

Penurunan proporsi penduduk di Pulau Jawa tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, angka pertumbuhan penduduk alami di Jawa lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk alami di luar Jawa. Kedua, perpindahan penduduk ke luar Jawa lebih besar daripada yang masuk ke Pulau Jawa (migrasi neto negatif). Oleh karena itu, angka kepadatan penduduk di Pulau Jawa jauh lebih tinggi daripada kepadatan penduduk di luar Jawa. Pada tahun 2000, kepadatan penduduk di Pulau Jawa telah mencapai di atas 870, sedangkan di luar Jawa baru mencapai 47 jiwa per kilometer persegi.

Perbedaan tersebut tentunya telah merefleksikan perbedaan kondisi ekologis sehingga telah mempengaruhi kemampuan daya tampung dan daya dukung, terutama dalam menyediakan kebutuhan pangan. Distribusi penduduk antarwilayah yang belum seimbang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan alam maupun buatan tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, baik secara individu maupun secara kelompok, orang akan merespons adanya perbedaan peluang dari perbedaan kemampuan tersebut dengan melakukan migrasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka yang mempunyai akses informasi akan pilihan-pilihan di daerah lain yang dianggap mempunyai peluang lebih baik cenderung melakukan migrasi daripada harus tinggal di daerahnya. Kendati keputusan seseorang untuk pindah terkait adanya variasi motif, namun umumnya alasan utama adalah ekonomi.

Migrasi sebagai faktor penentu dalam distribusi penduduk telah menyebabkan perubahan komposisi jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dari data distribusi penduduk Indonesia menurut pulau besar yang menunjukkan perubahan sebagai berikut:

- Distribusi penduduk Indonesia tidak pernah merata.
- Persentase penduduk di Jawa terus mengalami penurunan.
- Persentase penduduk di Sumatra dan Kalimantan terus naik.
- Persentase penduduk di Sulawesi mengalami penurunan, kecuali pada periode 1990–2000.
- Persentase penduduk di pulau lainnya mengalami penurunan, kecuali pada periode 1980–1990.

Perubahan distribusi penduduk tersebut tidak hanya karena faktor spontanitas tetapi juga dipengaruhi oleh program pemindahan penduduk oleh pemerintah. Usaha untuk melakukan redistribusi penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Hindia-Belanda, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun apabila dilihat dari segi demografi tingkat migrasi seumur hidup di Indonesia masih rendah. Hasil studi tentang migrasi dengan dasar hasil Sensus 1971 menunjukkan bahwa hanya ada 5.703.037 atau 4,8% penduduk Indonesia bertempat tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi di mana mereka dilahirkan (*lifetime migrants*). Pada

tahun 1985 baru mencapai 7%, dan pada tahun 2000 migrasi seumur hidup sebesar 10,1%.

Rendahnya tingkat mobilitas tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh kegiatan ekonomi penduduk yang umumnya masih berbasis pertanian sehingga mereka terikat dengan kegiatannya, meskipun ada kelompok etnis yang tergolong mobilitasnya tinggi yaitu Bugis, Makassar, Banjar, Madura, dan Minangkabau. Penduduk dari Sulawesi Selatan yang umumnya adalah etnis Bugis dan etnis Makassar telah merantau ke provinsi lain terutama daerah pesisir, mulai dari Papua sampai dengan Sumatra. Mereka bahkan melakukan migrasi ke Afrika Selatan, Madagaskar, dan ke Asia Tenggara. Adapun penduduk etnis Minangkabau kebanyakan merantau ke daerah perkotaan di provinsi luar Sumatra Barat, terutama di Jawa, Provinsi Riau, dan banyak pula yang bermigrasi ke Malaysia. Fenomena orang merantau ke negeri lain untuk memperbaiki nasib telah menjadi tradisi.

Tabel 1. Distribusi dan Perubahan Penduduk Indonesia, 1961-2000

| Pulau | Persentase terhadap Penduduk | | | | | Perubahan dalam Persentase | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1961 | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 1961-1971 | 1971-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 |
| Jawa | 64,9 | 63,8 | 62,1 | 60,0 | 59,3 | -1,1 | -1,7 | -2,1 | -0,7 |
| Sumatera | 16,2 | 17,4 | 19,1 | 20,3 | 21,0 | +1,2 | +1,7 | +1,2 | +0,7 |
| Kalimantan | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | +0,1 | +0,3 | +0,5 | +0,3 |
| Sulawesi | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +0,1 |
| Pulau Lainnya | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,6 | 7,2 | -0,1 | -0,2 | +0,5 | -0,4 |
| Indonesia | 100 (90,0 juta) | 100 (199,1 juta) | 100 (146,7 juta) | 100 (179,2 juta) | 100 (201,2 juta) | - | - | - | - |

Sumber: Dihitung dari hasil Sensus Penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000

Catatan: Sensus penduduk 1980 dan 1990, termasuk Timor Timur, Sensus penduduk 2000, tidak termasuk Timor Timur

Hasil analisis penulis tahun 1999 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990 dan Supas 1995 menunjukkan perubahan pola migrasi berdasarkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perbedaan kondisi kependudukan dan perekonomian antardaerah dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penarik bagi penduduk untuk melakukan mobilitas. Data Sensus Penduduk 1990 menunjukkan bahwa ada 54% migran masuk KTI berasal dari provinsi KBI. Tahun 80-an KTI adalah daerah utama penempatan transmigrasi, terutama menuju Irian Jaya. Demikian pula banyak pegawai dari Bali, Jawa, dan Sumatra yang ditempatkan di Timor Timur. Sebaliknya, migrasi keluar dari KTI ke KBI hanya 36%. Adapun tahun 1995 arus migrasi masuk ke KTI turun menjadi 49%, dan sebaliknya arus migrasi keluar KTI menuju KBI mengalami peningkatan menjadi 47%. Meskipun ada peningkatan arus migrasi keluar dari KTI menuju KBI namun arus migrasi ke KTI masih lebih besar.

Kendati gambaran makro redistribusi penduduk secara sepintas mempunyai dampak yang kecil, namun apabila diperhatikan berdasarkan tingkat provinsi memberi gambaran yang berbeda. Hasil studi penulis yang menganalisis Supas 1985 menunjukkan paling sedikit ada 13 provinsi yang nampak jelas mengalami dampak migrasi, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Dilihat dari daerah asal Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi migrasi neto yang negatif, artinya lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk. Bagi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, hal ini berarti pengurangan terhadap tekanan penduduk yang memang sudah tinggi. Adapun bagi Provinsi Sumatra Barat pengurangan tersebut telah menimbulkan dampak terhadap komposisi penduduk, yaitu berkurangnya kelompok penduduk usia produktif. Kelompok umur tersebut mempunyai kecenderungan melakukan migrasi keluar atau merantau. Adapun provinsi-provinsi yang menunjukkan tingkat migrasi neto positif yaitu Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jambi, Papua, Sulawesi Tengah, Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dalam upaya mengendalikan distribusi penduduk yang menuju keseimbangan dengan daya tampung dan keseimbangan daya dukung lingkungan, kebijakan ini secara tidak langsung merupakan pilihan alternatif, di samping melakukan program relokasi penduduk secara langsung.

Perubahan distribusi penduduk antarpulau besar yang perlu diperhatikan adalah untuk Sulawesi. Pada kurun waktu 1961-1990, di Sulawesi mengalami perubahan yang negatif, namun sesudah itu justru mengalami perubahan positif. Besar kemungkinan, daerah tersebut terjadi penambahan penduduk akibat masuknya banyak migrasi terpaksa (*internally displaced persons*), terutama karena konflik sosial yang terjadi di Timor-Timur, Ambon, Papua, dan Maluku Utara. Banyak penduduk di daerah tersebut yang mengungsi ke Sulawesi. Pada waktu itu banyak penduduk asal Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang tinggal di daerah konflik kembali ke daerah asal. Setelah tumbangnya orde baru tahun 1998, di banyak tempat di Indonesia mengalami konflik sosial yang mengakibatkan migrasi terpaksa. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa tahun 2002 terdapat 1.353.963 jiwa yang mengungsi dan menyebar di 24 provinsi. Dari jumlah pengungsi tersebut sebanyak 373.772 jiwa mengungsi ke Sulawesi, terutama Sulawesi Tenggara sebanyak 216.528 jiwa.

Hasil penelitian penulis tahun 2003 dan 2004 tentang migrasi terpaksa atau lebih dikenal dengan pengungsi akibat konflik sosial di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Poso, dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pola penyebaran pengungsi bervariasi, tidak hanya jarak jauh melewati provinsi, tetapi juga untuk jarak dekat dalam provinsi yaitu antarkabupaten, antarkecamatan, bahkan ada yang hanya antardesa. Untuk kasus di Maluku Utara dan Poso, dominasi agama pengungsi adalah penentu daerah tujuan pengungsi. Pengungsi pada umumnya adalah kelompok agama yang menjadi minoritas di daerahnya dan mereka mengungsi ke daerah yang dikuasai oleh kelompok agama yang sama dengan mereka. Adapun untuk penelitian di Kalimantan Barat, mereka yang mengungsi didominasi oleh kelompok etnis Madura. Mereka mengungsi tidak

hanya ke Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak tetapi juga ada yang kembali ke daerah Madura. Kondisi kehidupan pengungsi umumnya sangat memprihatinkan karena telah meningkatkan angka mortalitas, kehilangan mata pencaharian, kehilangan harta benda, terlantarnya pendidikan anak, dan banyak menderita sakit. Penderitaan mereka tidak hanya dialami pada waktu di kamp-kamp penampungan, tetapi juga sesudah kembali ke daerah asalnya maupun setelah direlokasi ke tempat permukiman baru. Pengungsi etnis Madura yang berasal dari Kabupaten Sambas bahkan tidak seorang pun yang berani pulang ke desanya karena takut dibunuh oleh kelompok penduduk etnis Melayu Sambas.

Banyak lembaga non-pemerintah, baik nasional maupun internasional yang telah membantu pemulihan kondisi para pengungsi dan penduduk setempat. Upaya kemanusiaan untuk mengatasi persoalan pengungsi tersebut sangat besar nilainya, meskipun harus mengatasi banyak kendala. Merespons adanya masalah penanganan pengungsi, pada tahun 2003 PPK-LIPI bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri telah melakukan studi untuk membuat Standar Operasional Penanganan Pengungsi, namun sayang bahwa konsep tersebut tidak ditindaklanjuti, padahal konsep ini sangat penting dan telah dikerjakan dengan serius. Dalam tahun tersebut penulis juga bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk mencari konsep pemecahan masalah penduduk usia sekolah yang banyak terlantar, baik dalam pendidikan maupun dalam memasuki pekerjaan. Hasil kajian kami telah menjadi masukan Pemda Maluku Utara dalam menindaklanjuti program pembangunan sektor pendidikan daerah.

Dari sejumlah migran seumur hidup tahun 1971 sebanyak 11,3% (641.886 jiwa) adalah transmigran yang pindah ke provinsi lain karena ikut program transmigrasi yang disponsori oleh pemerintah. Hasil penelitian penulis di daerah transmigrasi menunjukkan bahwa sebagian besar transmigran telah berhasil dalam pembangunan ekonomi sehingga secara ekonomi memberi kontribusi positif bagi daerah. misalnya daerah yang pernah diteliti di Way Abung (Lampung), Parigi (Sulawesi Tengah), Sungai Pagar (Riau), Halmahera (Maluku Utara), dan Arso (Papua). Meskipun demikian, tidak sedikit daerah penempatan transmigrasi yang mengalami kegagalan sehingga banyak transmigran yang telah meninggalkan lokasi permukiman, antara lain di SPI, SPII, dan SPIII di Kecamatan Sipora, Mentawai. Adalah masuk akal bila pembangunan ekonomi daerah perdesaan di luar Jawa-Bali yang belum berkembang, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan daerah, meskipun pola transmigrasi yang dikembangkan tentunya tergantung pada kondisi daerah bersangkutan.

Fenomena bahwa migran lebih berhasil atau *adjusted* dibandingkan dengan nonmigran adalah merupakan fakta sosial karena mereka lebih selektif. Migran yang selektif tersebut mampu merebut kesempatan kerja di daerah tujuan sehingga penduduk setempat merasa tersaingi dan terus terdesak. Hal ini nampak dari studi di Kota Medan (1977), kota-kota di Irian Jaya (1996), Maluku Utara (2003), Kutai Timur (2002) dan Timor Timur (1995). Analisis penulis dari hasil Sensus 1990, untuk daerah perkotaan di Irian Jaya, menunjukkan bahwa migran secara umum dalam penyesuaian diri cenderung

mengalami proses modernitas. Dari 9 indikator modernitas, terdapat 7 indikator yang menunjukkan lebih maju. Satu indikator, yaitu pencapaian jenis pekerjaan tidak menunjukkan perubahan, dan satu indikator lingkungan permukiman bahkan mengalami kemunduran.

Kendati demikian, berdasarkan hasil survei penulis, perkembangan ekonomi migran dapat menimbulkan kesenjangan dengan kehidupan ekonomi penduduk setempat sehingga ikut memberi kontribusi timbulnya konflik sosial, misalnya kasus di Poso, Halmahera Utara, Papua, dan Sambas². Hal ini dapat terjadi di satu pihak migran kurang toleran dan kurang tenggang rasa terhadap nilai-nilai dan kesempatan penduduk setempat, di pihak lain penduduk setempat masih memiliki rasa *primordial* kesukuan yang tinggi sehingga muncul rasa curiga dan iri hati. Meskipun demikian, di tempat lain seperti Lampung dan Kalimantan Timur, konflik sosial disertai kekerasan justru intensitasnya sangat rendah, meskipun konflik selalu hadir di mana saja dan kapan saja, yaitu sebagai fenomena sosial yang wajar. Atas dasar kenyataan tersebut di atas, program investasi di daerah luar Jawa-Bali (misalnya di KTI) yang sumber daya manusianya masih terbatas, tentunya mendatangkan penduduk dari daerah lain (katakanlah Jawa), merupakan alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, namun perlu pula untuk merekrut penduduk setempat agar tidak muncul disparitas yang mencolok. Hal ini untuk menghindari konflik yang dicerminkan adanya ungkapan penduduk setempat “ ini daerah kami ”; “ Jawanisasi ”; “ Islamisasi. ”

Hasil sensus penduduk tahun 1961, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia baru mencapai 97,02 juta jiwa, namun pada bulan Juni tahun 2000 telah mencapai 201,242 juta jiwa. Hanya dalam tempo 39 tahun penduduk Indonesia telah mengalami kelipatan lebih dari dua kali. Meskipun angka pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung mengalami penurunan, namun dalam tahun 2050, berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh Tri Sucipto dan Tukiran (1995), jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 284,30 juta jiwa.³

Perkembangan jumlah absolut penduduk Indonesia mempunyai implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, misalnya peningkatan tentang kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan peningkatan masalah lingkungan hidup. Pembangunan kependudukan menjadi sangat penting yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, mengurangi angka kematian, dan pengelolaan migrasi penduduk. Pemerintah berkepentingan untuk mengelola migrasi agar dapat memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki dan sekaligus mengatasi permasalahan yang dapat ditimbulkan. Salah satu fenomena sosial yang terjadi bahwa telah terjadi proses urbanisasi yang terus

² Konflik sosial merupakan pertentangan kepentingan kelompok penduduk, umumnya mempunyai dimensi yang kompleks.

³ Skenario II, adapun hasil skenario I jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 308,15 juta jiwa.

mengalami peningkatan yang sering dipersoalkan oleh pemerintah kota karena telah menimbulkan ketidakseimbangan dengan daya dukung kota.

Berdasarkan data sensus penduduk nampak penduduk telah terdistribusikan ke daerah perkotaan yang berbeda menurut pulau-pulau besar. Pulau Jawa ternyata mempunyai tingkat urbanisasi paling besar dibandingkan dengan di luar Jawa. Tahun 2000, proporsi penduduk Jawa yang tinggal di daerah urban telah mencapai 48,7% . Di Jawa terdapat kota-kota metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Atas dasar data distribusi penduduk nampak bahwa proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (urban) yang terus mengalami peningkatan tersebut ditentukan oleh tiga komponen, yaitu reklasifikasi daerah, pertambahan alami, dan migrasi desa-kota yang positif. Urbanisasi sering dianalogkan pula dengan proses menjadi kota, dicirikan oleh sifat modernitas, yaitu sebagai pusat peradaban. Kota telah berfungsi tidak saja sebagai tempat konsentrasi permukiman penduduk, tetapi juga sebagai pusat kegiatan perdagangan, pusat kegiatan politik, pusat pendidikan, dan pusat jasa lainnya.

Suatu desa yang berkembang karena memiliki fasilitas yang dapat masuk kategori urban dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian, otomatis desa tersebut dapat berubah statusnya sebagai desa urban. Dengan adanya proses modernitas di daerah perdesaan yang juga disebut defusi urbanisasi karena pengaruh daerah perkotaan maka banyak desa menjadi kota sehingga penduduknya masuk kategori penduduk urban. Pertambahan alami, yaitu selisih jumlah penduduk yang lahir dengan jumlah penduduk yang mati di suatu daerah perkotaan, juga memberi kontribusi makin meningkatnya urbanisasi. Demikian pula dengan adanya migrasi neto positif di daerah perkotaan.

Selama ada ketimpangan antara kota dengan perdesaan maka fenomena mengalirnya penduduk perdesaan menuju daerah perkotaan tentunya tidak dapat dicegah dan telah menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif terutama di daerah perkotaan. Masalah terjadi karena pelayanan kota yang mengalami kelebihan beban (*over burdened*) dan mengalami deteriorasi lingkungan perkotaan. Akibat yang ditimbulkan, antara lain terjadi lingkungan permukiman yang tidak sehat, peningkatan setengah penganggur, transportasi yang buruk, kurangnya sanitasi, konflik tanah, dan disintegrasinya kehidupan keluarga. Sebagian besar migran dari perdesaan belum siap untuk dapat diserap ke dalam sistem ekonomi dan sosial kota. Penduduk dari perdesaan mengalir ke kota karena kesulitan ekonomi akibat rendahnya pendapatan dari hasil pertanian. Proses pemiskinan di perdesaan merupakan dorongan mereka harus keluar dari daerahnya. Adapun fasilitas kota dan banyaknya pilihan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin melakukan mobilitas vertikal terutama datang dari kelompok elit desa. Penduduk tidak dapat dicegah bermigrasi karena pada dasarnya mereka bebas melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain adalah merupakan hak setiap warga negara dan telah dijamin oleh *Universal Declaration of Human Right*. Meskipun demikian pengendalian mobilitas penduduk secara langsung dapat dilakukan dengan keharusan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Tabel 2. Distribusi Persentase Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar dan Status Desa-Kota, 1930-2000

| Pulau Besar | 1930 | | 1961 | | 1971 | | 1980 | | 1990 | | 2000 | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Desa | Kota |
| Jawa | 91,5 | 8,5 | 84,4 | 15,6 | 82,0 | 18,0 | 74,8 | 25,2 | 64,3 | 35,7 | 51,3 | 48,7 |
| Sumatra | - | - | 84,9 | 15,1 | 82,2 | 17,8 | 80,4 | 19,6 | 74,5 | 25,5 | 65,6 | 34,4 |
| Kalimantan | - | - | 81,4 | 18,6 | 78,2 | 21,8 | 78,5 | 21,5 | 72,4 | 27,6 | 63,7 | 36,3 |
| Sulawesi | - | - | 84,8 | 15,2 | 83,6 | 16,4 | 84,1 | 15,6 | 77,7 | 22,3 | 72,1 | 27,9 |
| Pulau Lainnya | - | - | 95,3 | 4,7 | 90,6 | 9,4 | 87,1 | 12,9 | 81,8 | 18,2 | 69,1 | 30,9 |
| Indonesia | 92,5 | 7,5 | 85,2 | 14,8 | 82,6 | 17,4 | 77,6 | 22,4 | 69,1 | 30,9 | 57,6 | 42,4 |

Sumber: Dihitung dari hasil Volkstelling 1930, dan Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Catatan: - Sensus 1930 hanya untuk Jawa.

- Sensus penduduk 1990, termasuk Timor Timur sebanyak 747.557 jiwa.

- Sensus penduduk 2000, tidak termasuk Timor Timur

Hasil penelitian di Kota Surabaya tahun 2004 dan tahun 2005, menunjukkan bahwa keberadaan migran non-permanen sebagian besar berasal dari daerah perdesaan di Jawa Timur, umumnya bekerja di sektor informal, ternyata telah berlangsung lama dalam jumlah yang besar. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan, dan sebagian dari mereka masih membawa nilai-nilai dan cara hidup perdesaan (*rural way of life*). Di antara mereka bahkan tinggal sebagai penghuni liar (*squatters*). Terlepas dari dampak negatif akibat mengalirnya penduduk ke kota metropolitan yang melebihi daya tampung kota, keberadaan mereka sangat membantu golongan penduduk Kota Surabaya yang sudah mapan, bahkan sangat membantu usaha formal yaitu sebagai penyedia tenaga kerja murah dan menjadi distributor produk usaha formal.

Mereka sering dituduh sebagai penyebab timbulnya masalah permukiman di kota metropolitan. Usaha untuk mengatasi masalah urbanisasi, seperti di Kota Surabaya, sebaiknya dengan proses defusi urbanisasi berupa kebijakan prioritas pembangunan ke daerah perdesaan atau ke kota kecil dan menengah. Bilamana pembangunan, terutama sumber daya manusia, di daerah perdesaan, kota-kota kecil, dan kota ukuran sedang dapat meningkat maka akan menimbulkan nilai-nilai modernitas dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian penduduk perdesaan akan enggan untuk bermigrasi ke kota-kota besar. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah kota-kota metropolitan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang potensial sebagai pengirim migran perlu ditingkatkan. Demikian pula perbaikan transportasi dan komunikasi dengan daerah penyangga dapat meningkatkan mobilitas ulang-alik sehingga mereka tidak harus menjadi migran permanen di kota-kota besar.

Isu kependudukan lain yang sangat penting adalah migrasi internasional dan mobilitas penduduk di daerah perbatasan. Dalam era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dapat dicirikan dengan adanya peningkatan arus mobilitas penduduk dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Arus mobilitas tersebut bukan saja yang masuk ke Indonesia,

tetapi sebaliknya juga yang keluar dari Indonesia. Sampai saat ini informasi makro tentang mobilitas penduduk yang masuk ke Indonesia masih terbatas sehingga hal ini merupakan agenda yang menarik untuk diadakan penelitian, antara lain terkait erat dengan arus investasi yang masuk ke Indonesia oleh banyak negara maju. Sejauh ini perhatian peneliti cenderung pada persoalan migrasi internal Indonesia sesuai dengan isu yang muncul dalam kaitannya dengan pembangunan. Salah satu kendala utama adalah belum lengkapnya data makro. Sensus penduduk belum mengkaitkan data migrasi dengan keperluan data migrasi internasional. Satu-satunya pertanyaan dalam sensus hanya dari kategori tempat lahir/tempat tinggal sebelumnya adalah luar negeri. Meskipun demikian pada waktu penulis melakukan penelitian mobilitas penduduk dalam konteks daerah perbatasan di Sangir (1994), Nunukan (1997), Papua (1996), dan NTT (Agustus 2005), data dan informasi mobilitas penduduk lintas batas dengan negara tetangga dapat diungkapkan.

Mobilitas penduduk lintas batas antara Indonesia dan Filipina terjadi di Sangir, tepatnya di daerah Tabukan Utara. Sebagian besar penduduk yang melakukan mobilitas lintas batas perbatasan tersebut adalah penduduk keturunan etnis Sangir yang tinggal di Filipina Selatan, umumnya tinggal di P. Balut dan P. Saranggane. Jumlah penduduk keturunan etnis Sangir yang tinggal di Filipina Selatan lebih dari 10 ribu jiwa. Mereka mempunyai kerabat di daerah Sangir, sehingga mereka mempunyai kontak dengan saling mengunjungi. Fenomena yang terjadi yaitu adanya migrasi kembali orang-orang kerurunan etnis Sangir tersebut ke Indonesia. Hal ini terjadi karena kehidupan mereka di Filipina sangat menderita, akibat gangguan keamanan dan ketidakpastian pemilikan lahan. Arus migrasi kembali ke Indonesia meningkat pada kurun waktu 1980-1999. Mereka umumnya kembali ke Indonesia melalui P. Marore, kemudian tinggal sementara di Kecamatan Tabukan Utara untuk mengurus surat perjalanan guna selanjutnya berlayar ke Halmahera untuk tujuan menetap. Pada waktu penulis meneliti di Halmahera tahun 1994 mereka berhasil mengelola kebun kelapa, kebun cengkih, dan menjadi nelayan. Keberhasilan kehidupan ekonomi mereka bahkan sempat menimbulkan masalah dengan penduduk lokal yang beragama Islam, misalnya di daerah Togasa (Galela) dan di daerah Saekona (Oba).

Pada waktu penulis melakukan penelitian kembali di Halmahera tahun 2003 dapat diketahui bahwa mereka telah menjadi korban konflik sosial sehingga menjadi bagian dari 117 ribu pengungsi terpaksa (*internally displaced persons*) asal Maluku Utara. Umumnya mereka mengungsi di Bitung, Sulawesi Utara. Konflik sosial antara kelompok penduduk yang beragama Kristen dengan kelompok penduduk yang beragama Islam telah mengakibatkan kemunduran kehidupan penduduk di Maluku Utara, termasuk orang-orang asal etnis Sangir. Dengan adanya program penanganan pengungsi, mereka sebagian telah kembali ke desa-desa di Maluku Utara, dan sebagian ikut program relokasi di Sulawesi Utara.

Orang Filipina yang sering melakukan mobilitas ke Sulawesi Utara umumnya untuk urusan bisnis, termasuk kegiatan ilegal seperti menyelundupkan minuman serta mencuri dan membeli ikan di laut. Barang dagangan yang sering dijual ke Sangir

selain minuman keras maupun *soft drink* juga berbagai peralatan untuk kebutuhan nelayan. Sampai tahun 2002, nelayan di Nusa Tabukan juga sering berdagang ke Filipina Selatan terutama memasukkan barang dagangan rokok putih merek Durian, Mas, dan Kampiun. Adapun komoditi asal Indonesia yang banyak dijual ke Davao, Filipina, antara lain rokok keretek, sabun, batik, dan valas. Setelah itu perdagangan ilegal oleh nelayan Sangir berhenti setelah adanya perdagangan legal oleh pedagang asal Kecamatan Peta. Perdagangan yang dilakukan dengan 3 kapal, telah mampu membanjiri produk peralatan rumah tangga asal China dan Filipina, tidak hanya di Kabupaten Sangir tetapi juga ke Kota Manado.

Hasil penelitian di daerah perbatasan Nunukan-Kalimantan Timur dengan daerah Negara Bagian Malaysia di Sabah menunjukkan adanya intensitas mobilitas penduduk lintas batas yang tinggi, terutama karena daerah tersebut merupakan pintu terdepan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia Timur, baik yang legal maupun yang ilegal. Berdasarkan data keimigrasian di Nunukan tercatat sebanyak 36 ribu tenaga kerja Indonesia yang berada di Sabah, 36% adalah laki-laki. Tenaga kerja laki-laki umumnya bekerja sebagai pekerja kasar, yaitu buruh pabrik, buruh perkebunan kelapa sawit, perkebunan cacao, dan buruh perkayuan. Adapun tenaga kerja perempuan ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, juru masak, bahkan ada yang terjebak sebagai pekerja seks komersial. Upah yang diterima bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan. Sebagai contoh upah buruh pabrik 400 ringgit, buruh perkebunan 350 ringgit, dan pembantu rumah tangga 300 ringgit.

Masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja ilegal adalah ketika tertangkap pada saat operasi yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia. Semenjak tahun 1994 hingga tahun 1996 tenaga kerja yang dideportasi sebanyak 18.652 jiwa. Mereka yang ditangkap tersebut kadangkala dapat “berdamai” dengan memberi uang sekitar 20 ringgit. Selain itu, ada juga tauke yang baik hati dengan membantu uang untuk mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang besarnya 1500 ringgit. Mereka yang dideportasi tersebut hampir seluruhnya kembali masuk ke Sabah dengan dibantu oleh para calo dan dibuatkan paspor kunjungan.

TKI yang kembali dari Malaysia untuk tujuan ke Sulawesi Selatan, Flores, Lombok, dan Jawa Timur selalu lewat Nunukan. Adapun warga negara Sabah yang melakukan mobilitas ke Indonesia umumnya untuk urusan bisnis atau keluarga. Mereka yang masuk ke Indonesia umumnya adalah warga Sabah keturunan etnis Bugis, etnis Tidung, dan etnis China. Mereka sebagian telah dideportasi kembali ke Malaysia karena telah melewati waktu tinggal di Indonesia.

Adapun mobilitas penduduk di daerah perbatasan Jayapura, dalam keadaan normal menunjukkan lebih banyak orang Papua New Guinea (PNG) yang ke Jayapura daripada orang Jayapura ke PNG. Hal ini karena kondisi ekonomi di Jayapura lebih baik daripada kondisi ekonomi daerah Sandaun Province di PNG. Orang PNG yang melakukan mobilitas ke Jayapura dapat dikategorikan : (1) Mereka yang pergi untuk urusan sosial-budaya karena penduduk desa-desa di Kabupaten Jayapura umumnya mempunyai etnis yang sama dengan penduduk desa-desa perbatasan di wilayah PNG;

(2) Untuk menggarap tanah kebun karena mereka punya kebun di desa perbatasan Jayapura, antara lain orang Wutung (PNG) punya kebun di Desa Skow (Jayapura); (3) Mereka yang pergi untuk urusan dagang atau mencari hiburan di Kota Jayapura atau di Abepura. Bagi mereka yang pergi ke Jayapura diharuskan menggunakan paspor, adapun untuk urusan sosial-budaya cukup dengan Kartu Lintas Batas, yaitu sebagai pelintas batas tradisional. Pada saat ini mobilitas penduduk antara Jayapura dengan penduduk di Vanimo, PNG mengalami peningkatan karena telah berfungsinya jalan darat yang dapat dilalui kendaraan mobil.

Pada saat Irian Jaya terjadi konflik antara kelompok OPM dengan pemerintah RI pada kurun waktu 1968–1987, sebanyak 20 ribu orang telah bermigrasi secara terpaksa (*forced migration*) ke PNG. Di PNG umumnya mereka tinggal di 16 lokasi di Western Province dan di West Sepik. Mulai tahun 1987, terjadi arus balik di antara mereka kembali ke daerah asalnya di Irian Jaya karena tidak menemukan kehidupan seperti yang dijanjikan oleh OPM, dan masyarakat di PNG kurang menerima kehadiran mereka karena telah menjadi pesaing dalam pekerjaan.

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja murah, terutama ke Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Singapore, Hongkong, dan Korea Selatan. Dari data Laporan Tahunan Ditjen Binapenta, tahun 2000 jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 457.876 jiwa. Kesempatan kerja tersebut dapat diperoleh karena jenis pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, pelayan, dan buruh perkebunan sudah ditinggalkan oleh penduduk negara tersebut. Dilihat dari kepentingan individu dan keluarga hal ini dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kehidupannya (*survival strategy*). Adapun dalam konteks yang luas, arus migrasi tenaga kerja tersebut merupakan bagian dari kerangka investasi ekonomi global. Untuk dapat bekerja di negara tersebut umumnya secara legal melalui perusahaan jasa tenaga kerja, dan sebagian dilakukan dengan cara ilegal. Mereka yang bekerja di luar negeri secara ilegal tentunya akan memperoleh risiko yang besar. Mereka yang berstatus *illegal migrants* adalah mereka yang berangkat tanpa dokumen resmi, mereka yang masuk secara legal kemudian *overstay*, dan mereka yang pindah majikan sehingga kehilangan dokumen. Adapun mereka yang bekerja secara legal, kendati terlindungi, beberapa risiko dapat terjadi. Beberapa kasus telah terjadi, misalnya mengalami penipuan, penyiksaan, perkosaan, dan kecelakaan.

Hasil penelitian penulis menunjukkan pula bahwa risiko tidak saja terjadi di luar negeri, tetapi juga di Indonesia, baik pada tahap menjelang keberangkatan maupun setelah pulang dari luar negeri. Ini semua dapat terjadi sebagai konsekuensi masih lemahnya pengelolaan calon TKI yang ditangani oleh banyak pihak dan rendahnya pengetahuan dan kemampuan calon TKI itu sendiri. Informasi yang diterima oleh pekerja migran umumnya kurang akurat, kurang komprehensif, memakan waktu, dan kurang layak. Akibatnya, calon TKI telah menjadi objek, baik langsung maupun tidak langsung oleh para oknum, dan telah menjadi objek pemerasan yang sering dilakukan oleh para calo. Apapun kemungkinan risiko yang akan menimpa para TKI, minat untuk bekerja di luar negeri senantiasa besar. Hal ini karena sulitnya untuk memperoleh

pekerjaan yang layak di Indonesia, di samping adanya pengharapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar bila bekerja di luar negeri. Gambaran sukses mereka yang pernah bekerja di luar negeri, misalnya dapat membangun rumah permanen, menyekolahkan anaknya, dan membantu rumah ibadah, ternyata telah merangsang minat calon TKI di daerahnya.

Beberapa pemikiran untuk mengatasi masalah TKI terkait dengan status ilegal, informasi, pembangunan, remitan, dan kesejahteraan. Dalam hal status ilegal, nampaknya diperlukan upaya negosiasi bilateral guna mengatur pola migrasi yang menyebabkan status ilegal. Selain itu, proses desentralisasi pengelolaan sangat diperlukan untuk menyederhanakan proses pemberian informasi dan fasilitas bagi para calon pekerja migran oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Imigrasi, dan proses pelatihan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Migran yang terbukti telah memberi kontribusi masuknya devisa ke daerah asalnya, tentunya perlu adanya koordinasi program dalam memanfaatkan pendapatan mereka agar lebih efektif untuk usaha produktif dan sesuai pula dengan pembangunan daerahnya. *Indonesian Observer* (18 Maret 1995), telah mencatat sekitar 10.000 pekerja migran dari NTB yang bekerja di Malaysia mengirim uang ke daerah asalnya hingga mencapai Rp 120 milyar setiap tahun, jauh lebih besar daripada jumlah *budget* di provinsi tersebut hanya sebanyak Rp 80,4 milyar. Hal serupa juga terjadi di daerah pengirim lainnya seperti Indramayu, Tulung Agung, dan Flores Timur. Selain itu, perlu pula untuk meningkatkan upaya penyelamatan pengiriman uang ke daerah asalnya, tentunya melalui fasilitas perbankan, seperti apa yang telah dilakukan oleh BRI di Larantuka. Hal ini perlu mendapat perhatian karena arus remitan telah berperan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, baik pada skala keluarga maupun pada skala masyarakat, bahkan dapat mendorong terjadinya mobilitas vertikal dan transformasi sosial.

PENUTUP

Meneliti isu kependudukan merupakan upaya untuk membaca atau memahami fakta-fakta sosial yang hidup di masyarakat yang merupakan sebagian potret dari siklus kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, di mana pun dan kapan pun, senantiasa selalu terjadi proses perubahan yang ditandai adanya kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Kejadian tersebut telah melahirkan dinamika kependudukan yang berbeda menurut dimensi waktu maupun menurut dimensi ruang. Banyak faktor non-demografi yang menyebabkan komponen demografi terus mengalami perubahan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, upaya untuk terus menerus melakukan penelitian kependudukan merupakan keharusan. Hal ini merupakan bagian dari proses menuju pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang dinamis, pada gilirannya diharapkan dapat menjadi masukan menuju upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia masa depan. Kegiatan penelitian yang

dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah, pada dasarnya merupakan upaya kolaboratif melalui proses deduksi dan proses induksi.

Ahli kependudukan yang tertarik dengan penelitian migrasi penduduk jumlahnya masih terbatas. Salah satu faktor karena fenomena migrasi penduduk secara metodologis lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan penelitian fertilitas atau pun mortalitas. Meskipun demikian untuk memberi prioritas penelitian migrasi agar lebih bermakna manakala variabel migrasi dianggap sebagai variabel bebas (*independent variable*) karena dapat mengkaji dampak yang diakibatkan, antara lain dapat menyebabkan perubahan sosio-demografi misalnya terjadinya konflik sosial, dapat meningkatkan kualitas penduduk atau bahkan sebaliknya. Penelitian yang melihat migrasi sebagai variabel bebas merupakan agenda penelitian yang perlu lebih banyak dilakukan di Indonesia, sejalan dengan kebijakan untuk pengendalian migrasi penduduk.

Penelitian yang telah kami lakukan selama ini tentunya telah ikut memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kependudukan, khususnya migrasi di Indonesia. Saya menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan bukan semata karena prestasi perorangan, namun merupakan ramuan dari pengetahuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel. 1988. "Kebijaksanaan Urbanisasi Dengan Hampiran Sosial." Makalah disampaikan pada Kongres ke IV Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI). Jakarta: 14-17 Januari.
- Aswatini; Suko Bandiyono; Widayatun; Bayu Setiawan. 1996. *Pemanfaatan Potensi dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Bandiyono, Suko; Aswatini Raharto; Eniarti Djohan; Herry Yogaswara; Sri Hargiono. 2004. *Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG*. Suko Bandiyono (ed). Jakarta: PPK-LIPI.
- Bandiyono, Suko; Bayu Setiawan; Ade Latifa. 2003. "Menata Kembali Kehidupan Penduduk Pasca Kerusakan Sosial di Maluku Utara." Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kerusakan Sosial*. Jakarta: PPK-LIPI.
- Bandiyono, Suko, Laila Nagib, Ade Latifa, Fitranita. 2002. *Kutai Timur Membangun Tanah Harapan*. Jakarta: PPK-LIPI.
- Bandiyono, Suko. 1991. "Migrasi Penduduk Antar Propinsi di Indonesia Timur". *Demografi Indonesia*, XVIII (35).
- Bandiyono, Suko. 1983. "Pekerjaan di Luar Sektor Pertanian dan Migrasi Desa-Kota: Suatu Respon Terhadap Tekanan Penduduk dan Pembangunan di Jawa". *Masyarakat Indonesia*, (10)2.
- Bandiyono, Suko. 1984. "Sektor Informal Dalam Penelitian". *Masyarakat Indonesia* (11)1.
- Bandiyono, Suko; Eniarti Djohan; Sri Hargiono; Soewartoyo. 1995. *Mobilitas Penduduk Daerah Perbatasan: Timor Timur*. Jakarta: PPT-LIPI.

- Bandiyono, Suko. 1997. *Mobilitas Penduduk & Pembangunan Daerah Analisis SUPAS – 95, Provinsi Timor Timur*. Jakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN & Lembaga Demografi, FE-UI.
- Bertand, Renaud. 1981. *National Urbanization Policy in Developing Countries*. Washington DC: Oxford University Press.
- Biro Pusat Statistik. 1980. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri S 2
- Biro Pusat Statistik. 2000. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri L2.2
- Biro Pusat Statistik. 1990. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri L.2
- Biro Pusat Statistik. 1971. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk. Seri D
- Biro Pusat Statistik. 1961. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk.
- Costello, Michael A. 1990. "Urbanization in the Southern Philippines: Diffuse or Metropolitan?". Paper presented at The Annual Meeting of the Population Association of America. Toronto: May 3-5.
- Goldscheider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*. Jakarta: CV Rajawali. Diterbitkan untuk Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Hauser, Philip M. 1959. Demography in Relation to Sociology," *American Journal of Sociology*, 65 (2).
- Hogo, Graeme. "Some Policy Implications Regarding International Labour Migration in East Indonesia." Policy Paper No.15, Prepared under the Indonesia-Australia Population Related Research for Development Planning and Development Assistance Project.
- Hogo, Graeme. 1980. "Indonesia: Population Distribution and Redistribution." *Majalah Demografi Indonesia*, No 13(VII).
- Hogo, Grame J. 1981. Policies and Programmes Affecting Migration and Urbanization in Indonesia. Dalam *Migration, Urbanization and Development in Indonesia*. New York: UN (Country Report III).
- Honggominarso, Suko B. 1977. *Migration Into the City of Medan: An Exploration of Migrant Adjustment*. Tallahassee: Dept. of Sociology. Florida State University.
- Indonesian Observer*, 1995. 18 Maret.
- Kammeyer, Kenneth C.W. 1971. *An Introduction to Population*. San Francisco: Chandler Publishing Company.
- Kammeyer, Kenneth C.W. 1970. *Population Studies : Selected Essays and Research*. Chicago: Rand McNally & Company.
- Lembaga Demografi FEUI. 1989. "Laporan Ulang Tahun Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ke 25". Jakarta, 28 Maret.
- Mayer, Kurt . 1962. "Developments in the Study of Population." *Social Research*, 29 (3).

- Mujiani; Deny Hidayati; Suko Bandiyono; Sri Sunarti P. 2000. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah di Kota Bontang dan Sekitarnya, Provinsi Kalimantan Timur*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. 2003. *Annual Report 2002*. Jakarta.
- Raharto, Aswatini; Daliyo; Fadri Alihar; Graeme J. Hogo; Haning Romdiati; Mita Noveria; Mujiyani; Suko Bandiyono; Soewartoyo. 2002. *Kebutuhan Informasi Bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Riau*. Haning Romdiati, Mita Noveria, Suko Bandiyono (eds.) Jakarta: PPK-LIPI.
- Raharto, Aswatini; Graeme Hogo; Haning Romdiati; Suko Bandiyono. 1999. *Migrasi dan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia: Isu Ketenagakerjaan*. Aswatini Raharto (ed.). Jakarta: Kerjasama antara PPT-LIPI dengan The Australian National University dan The Australian Agency for International Development.
- Raharto, Aswatini; Suko Bandiyono; Bayu Setiawan; Eniarti Djohan; Herry Yogaswara. 1997. *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Ramadhan KH; Hamid Jabbar; Rofiq Ahmad. 1993. *Transmigrasi, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Departemen Transmigrasi RI.
- Ravenstein, E.G. 1885. "The Laws of Migration". *Journal of the Statistical Society*, Vol 48(2).
- Robinson, Warren C. 1964. "The Development of Modern Population Theory." *American Journal of Economics and Sociology*, 23 (4).
- Romdiati, Haning; Mita Noveria; Suko Bandiyono. 2001. Pola dan Determinan Mobilitas Penduduk Dalam Konteks Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Jakarta: PPK-LIPI.
- Romdiati, Haning; Aswatini; Suko Bandiyono; Mita Noveria; Ade Latifa; Bayu Setiawan; Fitranita; Ken Fitria Indrawardani. 2004. *Migrasi dan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya*. Jakarta: PPK-LIPI.
- Suharso; Budi Suradji; Suko Bandiyono. 1988. "Gerak Perpindahan Penduduk Indonesia Berdasarkan SUPAS 1985." Makalah disampaikan pada Konperensi Nasional Pusat Studi Kependudukan V. Diselenggarakan oleh Meneg. KLH. Jakarta: 11-14 Januari.
- Suhartono P. 1980. "Population and Vital Registration in Indonesia." *Majalah Demografi Indonesia*, No 7(13).
- Suko Bandiyono (ed.). 1987. *Migrasi Permanen Penduduk Jawa Timur*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Suko Bandiyono (ed.). 1989. *Migrasi Permanen Penduduk Bali*. Jakarta: PPT-LIPI.
- Tri Sucipto dan Tukiran. 1995. *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1990-2050*. Yogyakarta: PPK-UGM.